



RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2018-2023



KATA PENGANTAR

Dalam Rangka Pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang merupakan amanah dari Bapak Bupati Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk menyusun perencanaan strategis kinerjanya selama 5 (lima) tahun dalam bentuk dokumen Rencana Strategis.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Lima tahun sebagai dokumen Awal Perencanaan Kinerja untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (*good governance & clean government*). Renstra ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone atas seluruh Program & Kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun dalam periode pemerintahan bupati terpilih.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, serta Program dan Kegiatan beserta indikator dan target kinerja jangka menengah serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023.

Dengan demikian, Kami berharap Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi media perencanaan strategis kinerja yang bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada tahun 2018-2023 guna mendorong kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam rangka menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Bersih (Clean & Good Government) pada Pemerintahan Kabupaten Bone guna terwujudnya Visi Bupati Bone yaitu “*Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera*”

Watampone, 16 April 2019

KEPALA DINAS

Drs. ANDI AMRAN, M.S.i.
Pangkat : Pembina utama Muda
Nip. 19681122 198908 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .	38
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	39
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra.....	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	41
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Startegis.....	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	52
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.....	52
4.3 Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.....	52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII PENUTUP.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara Nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita Nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di tiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis (Renstra) adalah Suatu Dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 Tahun sehubungan dengan Tugas dan fungsi SKPD serta disusun dengan memperhitungkan Perkembangan Lingkungan Strategis. Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PPNo. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005) menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010). dan hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan

pengelolaan Informasi dan Komunikasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

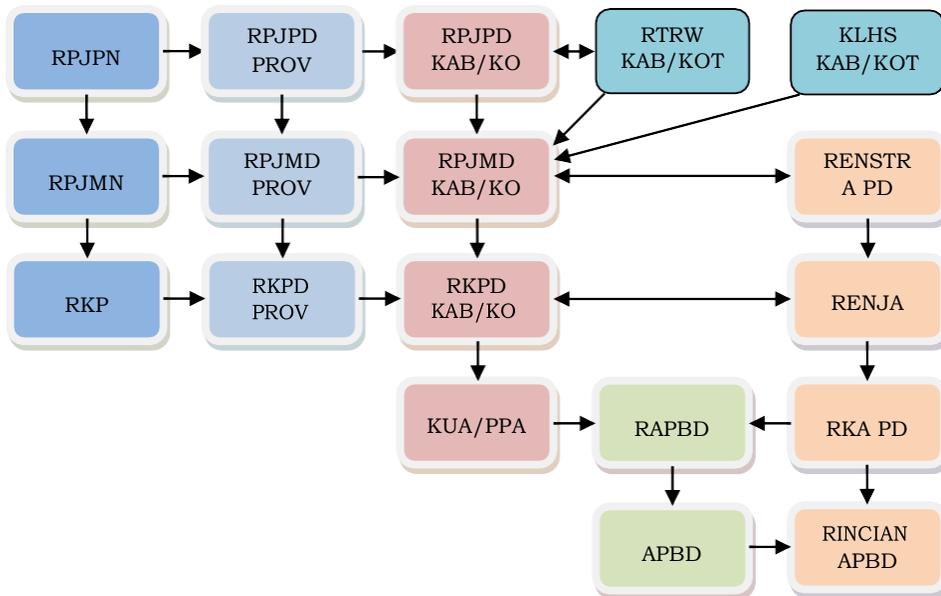
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Renstra diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Periode 5 (Lima) Tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam pencapaian target kinerja berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada periode lima tahun sebelumnya beserta isu-isu strategis yang menjadi tantangan kinerja untuk lima tahun berikutnya. Perencanaan strategis dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone pada Tahun 2018-2023 tersaji dalam dokumen Rencana Strategis ini, dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2018-2023 telah ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Bone yaitu mewujudkan **“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone mengacu pada (RPJMD) Kabupaten Bone melalui beberapa tahapan , sebagai berikut :

- Tahap Persiapan Penyusunan Renstra
- Tahap persiapan penyusunan Rancangan Awal Renstra
- Tahap persiapan penyusunan Rancangan Renstra
- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
- Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
- Verifikasi Rancangan Akhir Renstra
- Tahap Penetapan Renstra dengan Peraturan Bupati

Renstra Mempunyai keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dimana RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2008-2028. RTRW berposisi memberi arahan spasial kepada rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RPJMD. Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Sebagai bagian integral dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, desain perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Bone harus menunjukkan sinergitas dengan provinsi dan Nasional yang secara substansial tercermin dari formulasi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 selanjutnya menjadi acuan bagi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Bone, yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD). Selain itu, RPJMD ini dijabarkan ke dalam RKPD setiap tahun selama periode 2018-2023 dimana RKPD ini selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) setiap tahunnya, untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di dalam RPJMD ini akan dicapai secara bertahap setiap tahun, sehingga proses pembangunan daerah akan terlaksana dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Pemeriksaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3).

18. Peraturan Bupati Bone Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang terkait dengan urusan komunikasi, Informatika dan Persandian.

1.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone adalah :

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dan persandian Kab. Bone Tahun 2018-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
2. Memberikan Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kabupaten dalam rentang Tahun 2018-2023;
3. Menetapkan Tolak ukur kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023;

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I :Pendahuluan, ada bab ini memuat Latar Belakang Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai Berikut, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta Sistematika Penulisan penyusunan Renstra;

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Memuat Informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kab. Bone dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

priode seblumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatas melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini.

BAB III :Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas

Komunikasi Informatika Dan Persadian

Memuat Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone, telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah terpilih, telaahan Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan Rumusan Pernyataan Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan Rumusan Pernyataan Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Lima Tahun mendatang yaitu pada tabel 7.1

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Revisi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BONE

2.1 TUGAS, FUNGSI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

1. Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bone yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone dan Peraturan Bupati Bone Nomor 76 tahun 2016 tentang rincian tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dan mempunyai tugas pokok dan fungsi nyata :

a) Kepala Dinas

Tugas : Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, Persandian dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d. Pelaksanaan Administrasi dinas urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

b) Sekretaris

Tugas : Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan.

- Fungsi :
- a. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
 - b. Pelaksanaan program dan anggaran
 - c. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
 - d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistic, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat
 - e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja Kepala Dinas
 - f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga
 - g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan
 - h. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

c) Kepala Bidang Komunikasi

Tugas : Mempunyai tugas, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi untuk mendukung

- Fungsi :
- a. Penyusunan strategi perencanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;

- d. pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
- e. pelaksanaan penertiban dokumen pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
- f. pendokumentasian hasil pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
- g. pengendalian dan evaluasi pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;

d) Kepala Bidang Teknologi Informasi

Tugas : Pengendalian dan evaluasi Pengelolaan opini dan Aspirasi Publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;

- Fungsi :
- a. Penyusunan strategi perencanaan dibidang teknologi informasi dan pengolahan data elektronik;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang kemitraan media (media Relation) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, teknologi Informasi dan akses Informasi;
 - c. Pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi dibidang teknologi informasi dan pengolahan data elektronik;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dibidang teknologi informasi dan pengolahan data elektronik;
 - e. Pelaksanaan Penertiban dokumen dibidang teknologi informasi dan pengolahan data elektronik;
 - f. pelaksanaan pendokumentasian hasil dibidang teknologi informasi dan pengolahan data elektronik;
 - g. pengendalian dan evaluasi dibidang teknologi Informasi dan pengolahan data elektronik; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

e) Kepala Bidang Informasi Publik

Tugas : Kepala Bidang Informasi Publik yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan media (media Relation) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah.

- Fungsi :
- a. penyusunan strategi perencanaan dibidang hubungan media (media Relation) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah;
 - b. penyusunan strategi perencanaan dibidang hubungan media (media Relation) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dibidang hubungan media (Media Relation) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dibidang hubungan media (Media Relation) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah;
 - e. pelaksanaan penertiban dokumen dibidang hubungan media (Media Relation) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah;
 - f. pelaksanaan dokumentasi hasil dibidang hubungan media (Media Relation) dan pengembangan sumber

daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah;

- g. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dibidang hubungan media (Media Relation) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

f) Kepala Bidang Statistik

Tugas : Kepala Bidang Statistik yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendataan tentang sumberdaya alam, sumberdaya manusia, ekonomi, sarana, prasarana dan social budaya .

- Fungsi :
- a. pengumpulan dan Penyusunan data pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan daerah;
 - b. penyusunan statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya alam, SDM, ekonomi, sarana, prasarana dan sosial budaya; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

g) Kepala Bidang Persandian

Tugas : Kepala Bidang Persandian yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengiriman dan penerimaan berita

sandi dan telekomunikasi, pembinaan dan pemeliharaan alat-alat sandi serta pengamanan terhadap informasi / berita sandi dan telekomunikasi.

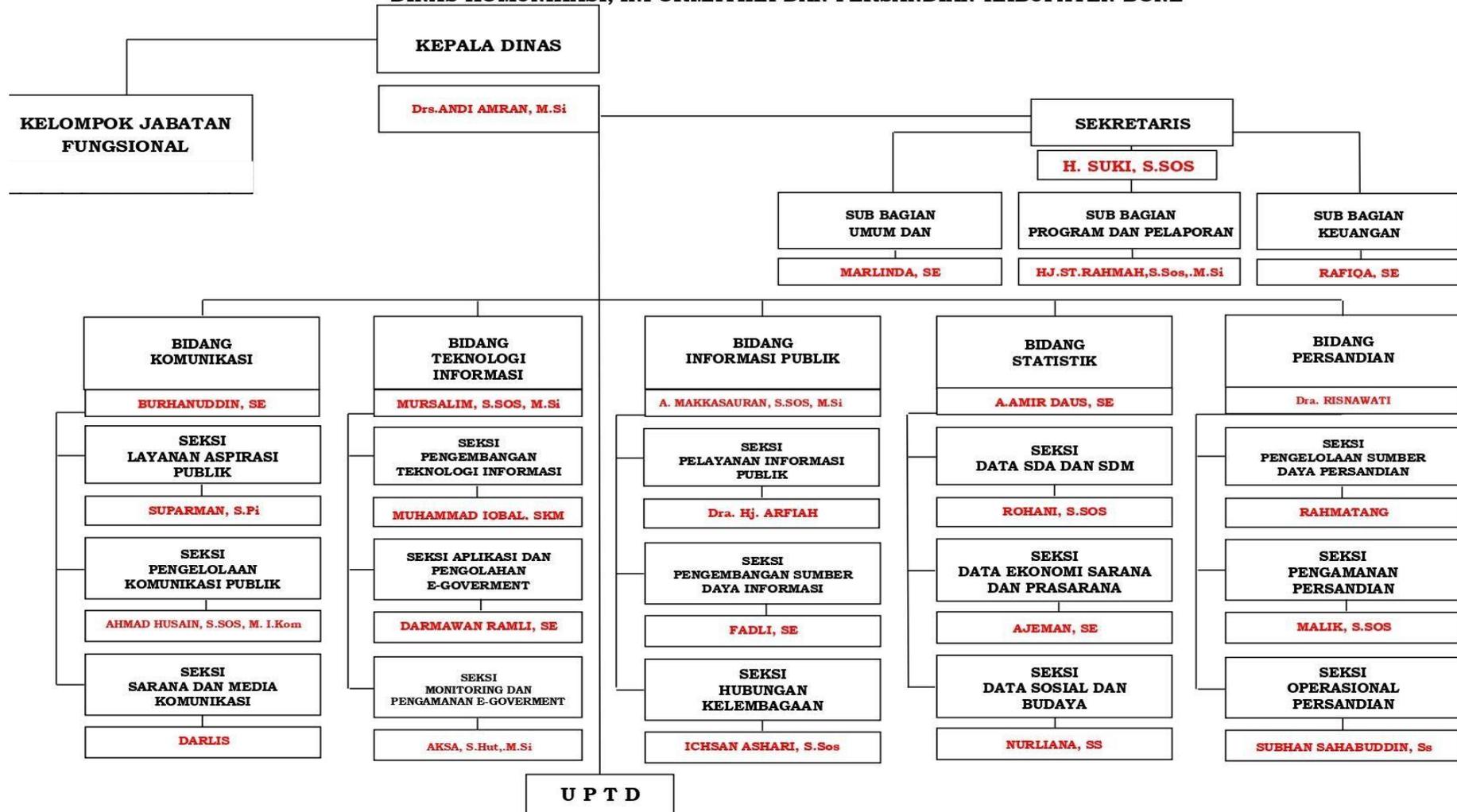
- Fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis persandian meliputi pembinaan SDM Sandi, pembinaan peralatan sandi, pembinaan sistem sandi pembinaan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) dan pembinaan kelembagaan sandi.;
 - e. pemberian dukungan di bidang persandian;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang persandian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang komunikasi terdiri dari:
 - 1. Seksi Layanan Aspirasi Publik;
 - 2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Media Komunikasi
- d. Bidang Teknologi Informasi terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi;
 - 2. Seksi Aplikasi dan Pengolahan E- Government ; dan
 - 3. Seksi Monitoring dan Pengamanan E- Government.
- e. Bidang Informasi terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Informasi ; dan
 - 3. Seksi Hubungan Kelembagaan.
- f. Bidang Statistik terdiri dari:
 - 1. Seksi Data Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Seksi Data Ekonomi Sarana dan Prasarana; dan
 - 3. Seksi Data Sosial dan Budaya.
- g. Bidang Persandian terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Persandian;
 2. Seksi Pengamanan Persandian; dan
 3. Seksi Operasional Persandian.
- h. UPTD
- i. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BONE**



2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

A. Sumber Daya Manusia

Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kabupaten Bone, disamping ditentukan oleh kemantapan system, mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengelolaan Informasi dan Komunikasi, juga sangat ditentukan oleh Kualitas sumber Daya Aparatur secara Signifikan akan menentukan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. Tahun 2018, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone didukung oleh 3 (Tiga puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri atas 7 orang Pascasarjana (S2), 19 orang berpendidikan Sarjana (S1), 6 orang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Klasifikasi PNS Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PNS			Persentase
		LK	PR	TOTAL	
1.	Strata 2	5	2	7	22%
2.	Strata 1	10	9	19	60%
3.	Diploma 4	0	0	0	-
4.	Diploma 3	-	-	-	0%
5.	SLTA	3	3	6	18%
6.	SLTP	-	-	-	-
JUMLAH		18	11	31	100%

Berdasarkan pangkat dan golongan Pegawai Negeri sipil (PNS) yang tergabung pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian terdiri atas 7 orang Gol. IV (1 orang Gol. IV/C , 1 orang Gol. IV/B dan 5 orang Gol.IV/a), 20 orang Gol. III (4 orang Gol.III/D, 9 Orang Gol.III/C, 6Orang Gol.III/B dan 1 orang Gol.III/A), dan 4 orang Gol.II (2 orang Gol.II/b, 2 Orang Gol. II/C, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Klasifikasi PNS Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH PNS			Persenta se
			LK	PR	TOTAL	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1	3%
2.	Pembina	IV/b	1	-	1	3%
3.	Pembina	IV/a	3	2	5	16%
4.	Penata Tk. I	III/d	2	2	4	13%
5.	Penata	III/c	6	3	9	29%
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	3	3	6	19%
7.	Penata Muda	III/a	-	1	1	3%
8.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1	1	2	7%
9.	Pengatur	II/c	1	1	2	7%
JUMLAH			18	13	31	100%

Berdasarkan tingkat Jabatan/Eselon Pegawai Negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas 1 orang Eselon II.b, 1 Orang Eselon III.A, 4 Orang Eselon III.B, 18 Orang Eselon IV.A dan 7 Orang Staf Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Klasifikasi PNS Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Berdasarkan Jabatan .

No.	JABATAN	ESELON	JUMLAH PNS			Persentase
			LK	PR	TOTAL	
1.	Kepala Dinas	II.b	1	-	1	3%
2.	Sekretaris	III.A	1	-	1	3%
3.	Kepala Bidang	III.B	3	1	4	12%

4.	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	IV.A	11	7	18	59%
5.	Staf		2	5	7	23%
JUMLAH			19	12	31	100%

Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat 33 (Tiga puluh tiga) orang Tenaga Non-PNS atau Tenaga Kontrak (Honoror) yang dipekerjakan untuk melaksanakan tugas-tugas fungsional umum lainnya, seperti pada tabel berikut ini

Tabel 2.4
Klasifikasi Tenaga Non-PNS/Honoror Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone

No.	URAIAN	PENDIDIKAN				JUMLAH			Persentase
		SM A	D3	S1	S2	LK	PR	TOTAL	
1	Operator Administrasi Umum	2	1	3		4	2	6	20%
2	Operator SIMBD			1		1		1	3%
3	Operator JKS			1			1	1	3%
4	Oprator Siakuda	1	-	2	-	2	1	3	11%
5	Operator Kepegawaian			1			1	1	3%
6	Oprator Adm.Keuangan		1				1	1	3%
7	Operator Pengelolaan PPID			1			1	1	3%
8	Operator Laporan Keuangan	1					1	1	3%
9	Operator Dok.Pertanggung			1			1	1	3%

	Jawaban								
10	Operator Sub.Bag.Program			1			1	1	3%
11	Pelayanan Sound System	4				4		4	14%
12	Kepala Studio SBB	1			1			1	3%
13	Operator Siaran Radio SBB	3		1	1			5	17%
14	Reporter			2		2		2	7%
15	Teknisi	1				1		1	3%
16	Sopir	1				1		1	3%
Jumlah								31	100%

Secara umum, dengan kondisi tersebut di atas tergambar bahwa secara kuantitatif, sumber daya Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone belum cukup memadai dibandingkan kebutuhan organisasi dengan mengacu pada beban kerja yang harus dilaksanakan. Selain itu, sangat diperlukan pengembangan kapasitas dan kompetensi bagi Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk meningkatkan kualitas Profesionalisme dalam menjalankan fungsi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kabupaten Bone. Kedepannya, juga diperlukan pengisian tenaga Aparatur khusus yang terkait dengan Kepegawaian atau Pejabat Struktural yang formasinya belum terisi pada tahun 2018. Kepala Bidang Statistik Untuk Sementara 2018 Kosong Dari Jumlah 31 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat 12 (Dua Belas) orang yang pernah mengikuti Diklatpim, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
 Klasifikasi PNS Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
 Yang Pernah Ikut Diklatpim

NO	Uraian	JUMLAH PNS			Persentase
		LK	PR	TOTAL	
1.	Diklatpim II	-	-	-	-
2.	Diklatpim III	2	-	2	17
3.	Diklatpim IV	4	6	10	83
JUMLAH				12	100%

Secara Umum dengan Kondisi tersebut diatas tergambar bahwa secara kuantitatif, sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kabupaten Bone belum cukup memadai dibandingkan kebutuhan Organisasi dengan mengacu pada beban kerja yang harus dilaksanakan. Selain itu, sangat diperlukan pengembangan kapasitas dan kompetensi bagi Aparat Dinas komunikasi Informatika dan Persandian untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengelolaan Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Daerah di Kabupaten Bone. Kedepannya, juga diperlukan pengisian Tenaga Aparatur khusus yang terkait dengan kepegawaian atau pejabat Struktural yang formasinya belum terisi pada Tahun 2018.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi. Sarana gedung kantor yang dipergunakan saat ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kompleks Kantor Bupati Bone bersama beberapa Instansi yang merupakan lembaga teknis daerah.

Selain itu terdapat pula sarana dan prasarana pendukung berupa peralatan dan perlengkapan kantor terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Sarana Dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

NO	NAMA JENIS BARANG	Merek	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH BARANG	HARGA	KEADAAN BARANG			SUMBER DANA
						BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Meja Kerja	Orbit Trend	2017	1 Set	Rp. 10.000.000	✓	-	-	APBD
2	Meja Kerja	Orbit Trend	2017	5 Set	Rp. 5000.000	✓	-	-	APBD
3	Mesin Ketik	Olivetti	2017	2 Unit	Rp. 5000.000	✓	-	-	APBD
4	Brankas	Nasional Safe	2017	1 Unit	Rp. 10.000.000	✓	-	-	APBD
5	AC	Panasonic	2017	5 Unit	Rp. 37.500.000	✓	-	-	APBD
6	Televisi	LG/LED	2017	2 Buah	Rp. 12.000.000	✓	-	-	APBD
7	Kursi Kerja	Frontline	2017	1 Buah	Rp. 5000.000	✓	-	-	APBD
8	Kursi Kerja	Frontline	2017	18 Set	Rp. 36.000.000	✓	-	-	APBD
9	Kursi Kerja	Futura	2017	26 Buah	Rp. 13.000.000	✓	-	-	APBD
10	Kursi Kerja	Frontline	2017	6 Buah	Rp. 18.000.000	✓	-	-	APBD

11	Sofa		2017	1 Set	Rp. 25. 000.000	✓	-	-	APBD
12	Komputer/PC	Lenovo	2017	6 Unit	Rp. 60. 000.000	✓	-	-	APBD
13	Komputer Note Book	Asus	2017	2 Unit	Rp. 20. 000.000	✓	-	-	APBD
14	Komputer Note Book	Lenovo	2017	1 Unit	Rp. 10.000.000	✓	-	-	APBD
15	Printer	Hp Laserjet P 1102	2017	1 Unit	Rp. 5.000.000	✓	-	-	APBD
16	Printer	Epson L 360	2017	3 Unit	Rp. 15.000.000	✓	-	-	APBD
17	Scanner	Epson	2017	2 Unit	Rp. 10.000.000	✓	-	-	APBD
18	Dispenser	Politron	2017	2 Unit	Rp. 2500.000	✓	-	-	APBD
19	Dispenser	Miyako	2017	1 Unit	Rp. 1500.000	✓	-	-	APBD
20	Kulkas	Sharf	2017	1 Unit	Rp. 2500.000	✓	-	-	APBD
21	Faxsimile	Panasonic	2017	3 Unit	Rp. 19.800.000	✓	-	-	APBD
22	Lemari Arsip		2017	2 Buah	Rp. 7.000.000	✓	-	-	APBD
23	Filing Kabinet	Frontline	2017	2 Buah	Rp. 5.500.000	✓	-	-	APBD
24	Gengset	Harry	2017	1 Unit	Rp. 7500.000	✓	-	-	APBD
25	Power Mixer 20 Amper	SoundQueen	2017	1 Unit	Rp. 18.250.000	✓	-	-	APBD
26	Equaliser	DBX	2017	1 Unit	Rp. 4500.000	✓	-	-	APBD
27	Wiralex Portable Sistem	SoundQueen	2017	1 Unit	Rp. 13.000.000	✓	-	-	APBD
28	Audio Mixer	T.Sharp	2017	1 Unit	Rp. 4000.000	✓	-	-	APBD
29	Mixer Siaran Luar	Yamaha	2017	1 Unit	Rp. 1.375.000	✓	-	-	APBD

30	Audio Digital Sound	Benjie	2017	1 Unit	Rp. 1000.000	✓	-	-	APBD
31	Mc Wiralwlex		2017	1 Unit	Rp. 1.625.000	✓	-	-	APBD
32	Speaker 15 Inchi	Port Bt	2017	2 Unit	Rp. 1.120.000	✓	-	-	APBD
33	Boox Speaker 12 Inchi 2 Mata		2017	2 Unit	Rp. 3000.000	✓	-	-	APBD
34	Handpone	Saitel	2017	1 Unit	Rp. 440.000	✓	-	-	APBD
35	Komputer PC	Lenovo	2017	2 Unit	Rp. 20.000.000	✓	-	-	APBD
36	Table PC	Samsung	2017	1 Buah	Rp. 13.200.000	✓	-	-	APBD
37	Komputer Note Book	Asus	2017	1 Buah	Rp. 18.000.000	✓	-	-	APBD
38	Komputer Note Book	Asus	2017	2 Buah	Rp. 24.000.000	✓	-	-	APBD
39	Printer	Epson L360	2017	3 Buah	Rp.10.500.000	✓	-	-	APBD
40	Printer	Epson L310	2017	1 Buah	Rp.2500.000	✓	-	-	APBD
41	Stabillizer	Toyosaki 2000	2017	1 Buah	Rp. 1.175.000	✓	-	-	APBD
42	Main Board		2017	1 Buah	Rp. 1.875.000	✓	-	-	APBD
43	Kamera	Canon	2017	2 Buah	Rp. 20.000.000	✓	-	-	APBD
44	Drone	Phanton 4	2017	1 Buah	Rp. 25.000.000	✓	-	-	APBD
45	Komputer /PC	Lenovo	2018	3 Unit	Rp. 24.000.000	✓	-	-	APBD
46	Komputer Note Book	Asus	2018	1 Buah	Rp. 10.000.000	✓	-	-	APBD
47	Printer	Epson L 360	2018	3 Buah	Rp. 10.500.000	✓	-	-	APBD

48	Server	Xeon	2018	1 Unit	Rp. 154.880.000	✓	-	-	APBD
49	Jaringan		2018	1 Unit	Rp. 189.750.000	✓	-	-	APBD
50	CCTV		2018	1 Unit	Rp. 8000.000	✓	-	-	APBD
51	Check Clock	Soluction X 601	2018	1 Buah	Rp. 6000.000	✓	-	-	APBD
52	Meja Kerja Eselon 3	Meja Kerja Eselon III	2018	6 Buah	Rp. 15.000.000	✓	-	-	APBD
53	Meja Kerja Eselon 4	Meja Kerja Eselon IV	2018	18 Buah	Rp. 36.000.000	✓	-	-	APBD

Namun demikian dari segi jumlah dan jenisnya, serta keadaan fisik kantor tersebut, kondisi sarana dan prasarana tersebut belum memadai untuk optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten bone Tugas pokok dan fungsinya mengacu pada pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sebelumnya di jalankan oleh 4 (Empat) OPD yaitu :

1. Badan Perpustakaan, Kearsipan dan PDE Kabupaten Bone
2. Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone
3. Bagian Umum Setda Kabupaten Bone
4. Bagian Humas dan Infokom Setda Kabupaten Bone

Setelah resmi berdiri sendiri pada Tahun 2016, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone melakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 dengan Rincian urusan pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dapat dilihat pada tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Bone

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Pada				
										Tahun Ke-					Tahun ke -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tersedianya Buku Pedoman perencanaan pembangunan daerah							100	100				99,31	99,81				1,0	1,0
2	Tersedianya informasi perencanaan pembangunan daerah yang lebih akurat							100	100				99,13	99,64				100	100

3	Tersedianya komponen data pembangunan daerah yang valid dan akurat						100	100				99,37	99,47				1,0	1,0
4	Meningkatnya kualitas informasi pembangunan pemerintah daerah						100	100				99,38	99,94				1,0	1,0
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan						100	100				99,88	99,48				1,0	1,0
6	Terlaksananya data informasi pembangunan daerah						100	100				-	99,89				-	-

7	Tersedianya jaringan komunikasi dan informasi di pemerintah						100	100				0,00	99,94				0,0	0,0
8	Video mengenai informasi dan data hasil pembangunan						100	100				99,44	99,48				1,0	1,0
9	Jumlah Peserta yg mengikuti Sosialisasi Aplikasi berbasis Online						100	100				99,35	99,69				1,0	1,0
10	Tersedianya informasi pembangunan daerah yang dapat dilihat masyarakat						100	100				99,83	99,89				1,0	1,0

11	Jumlah Masyarakat mendapatkan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan melalui media							100	100				99,66	98,89				1,0	1,0
----	---	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--	-------	-------	--	--	--	-----	-----

Tabel 2.7 di atas Menunjukkan Tingkat Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2014-2016 Masih kosong dengan alasan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian baru berdiri pada Akhir Tahun 2016

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
 Kabupaten Bone

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-					Tahun Ke -					Tahun Ke -					Anggaran	Realisasi
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik				63.000.000	147.000.000				2.881.328	56.113.125				96,04	96,75		1,3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				222.000.000	240.007.200				165.900.000	210.157.225				97,70	98,24		0,3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				5.000.000	4.000.000				2.329.000	4.000.000				0,61	100		0,4
Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan				4.400.000	5.000.000				4.400.000	4.992.000				1,00	99,84		01

Bangunan Kantor																
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan				10.887.000	9.880.000				2.479.000	11.730.000				100	100	3,0
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar daerah				300.000.000	261.000.000				388.124.606	234.758.053				92,41	99,94	0,5
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran				73.645.000	305.722.800				233.960.500	295.933.900				97,52	99,85	0,2
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				380.000.000	-				376.000.000	-				100	-	-
Pengadaan Perlengkapan				240.000.000	31.250.000				214.500.000	29.750.000				100	100	5,9

Gedung Kantor																
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				110.800.000	411.500.000				337.400.000	406.630.000				100	99,91	0,2
Pengadaan Meubeler				124.000.000	-				112.000.000	51.000.000				100	100	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				137.000.000	51.000.000				2.500.000	100.000.000				72,38	100	1,0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional				125.750.000	100.000.000				79.612.526	83.505.986				72,38	92,78	0,2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				120.000.000	20.000.000				12.135.000	19.995.000				60,38	99,99	0,4
Penyusunan Laporan Capaian				-	34.100.000					36.738.500				-	99,96	-

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran				-	26.100.000				26.098.400				-	99,99			-
Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				95.000.000	60.000.000				48.385.000	59.961.000				50,93	99,94		0,7
Pengolahan , Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah				63.401.000	80.300.000				62.966.000	80.151.000				99,31	99,81		0,2
Verifikasi dan Validasi Sistem Data Base Desa (SDD)				54.350.000	79.785.000				74.085.000	93.448.000				99,13	99,64		0,1
Penyusunan dan				103.977.000	135.000.000				104.612.000	140.249.819				99,37	99,47		0,2

Pengumpulan data Informasi kebutuhan Penyusun																
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi				38.335.000	70.000.000				68.250.000	16.744.360			99,38	99,94		0,0
Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya komunikasi dan Informasi				51.778.500	40.000.000				30.640.600	4.758.000			99,88	99,48		0,2
Pengadaan Infrastruktur Jaringan komunikasi dan Informasi				-	-				158.561.500	-			-	-		-
Pengkajian dan				143.581.500	61.161.000				137.940.000	147.019.711			0,00	99,80		1,3

pengembangan Kebijakna Komunikasi dan Informasi																
Perencanaan dan Pengembngan Kebijakan Komunikasi informatika				162.126.500	147.194.000				137.948.000	143.849.800			99,44	99,42		0,1
Pengembangan Komunikasi Informatika					-								-	-		
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang lembaga Penyiaran Publik Lokal				-	100.000.000				91.640.000				-	99,83		-
Penyebaran Luasan Informai				281.278.500	95.000.000				150.587.000				99,35	99,89		-

yang bersifat penyuluhan bagi Masyarakat																	
Pengenalan Internet Kepada Masyarakat				60.000.000	45.000.000				64.843.800				99,83	98,89			-
Penyebaran Luasan Informasi pembangunan Daerah				470.000.000	100.000.000				106.377.781				99,99	99,40			-
Penyebaran luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				519.700.000	790.000.000				765.125.000				99,66	99,69			-

Tabel 2.8 Merupakan Gambaran Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Anggaran , Realisasi , Rasio Pada Tahun 2014-2016 Masih Kosong dengan Alasan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone Merupakan Dinas Baru yang terbentuk pada Akhir Tahun 2016, dan Tahun 2018 dapat dilihat mengalami Penurunan Anggaran selisih Rp. 200.000.000, sehingga terjadi perbedaan antara Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran 2017 dan Tahun 2018 berbeda .

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Periode 2018 – 2023 . dengan diinformasikan tujuan strategis ini maka tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya dengan mempertimbangkan sumber Daya dan kemampuan yang miliki Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Periode 2018-2023 berpedoman kepada dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan Kemampuan yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Bone memiliki beberapa Program dan kegiatan baru di penyusunan Renstra Tahun 2018-2023 .

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian**

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan seluruh Dinas dan Kecamatan untuk bertujuan mengidentifikasi Permasalahan serta factor – factor yang mempengaruhinya yang di hadapi setiap bidang berdasarkan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone juga disesuaikan dengan 5 (Lima) Bidang Urusan Wajib non Pelayanan Dasar yaitu Bidang komunikasi, Bidang Tehnologi Informasi, Bidang Informasi Publik, Bidang statistik dan Bidang Persandian.

➤ Adapun faktor yang mempengaruhi Permasalahan Urusan Komunikasi Informatika dan Persandian

1. Belum Tersedianya Sarana yang Memadai khususnya Pelayanan Berbasis Online sehingga Belum Terkoneksi Command Senter
2. Masih adanya beberapa Area yang *blank-spot*.
3. Infra Struktur Jaringan belum memadai.
4. Belum adanya data yang akurat, valid dan relevant serta Up to Date yang dapat mendukung terwujudnya kualitas Produk Perencanaan yang baik.

Kendala – Kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintahan Kabupaten Bone dalam Melakukan Penyebaran Luasan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Informasi Public guna mewujudkan keterbukaan Informasi Public dan menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui pemanfaatan TIK. konsekuensi logis dari hal ini yakni, ia akan berdampak buruk-baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat akan Informasi, karena memperoleh Informasi merupakan hak azasi manusia bagi setiap public atau masyarakat, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 , yang berbunyi : “ Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut di atas, maka pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar Publik Untuk memperoleh Informasi.

Dalam Rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan informasi maka pemerintah, Khususnya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone menetapkan berbagai Program , Strategi, arah kebijakan dan kegiatan secara tepat, responsive dan adaktif sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. namun yang menjadi Permasalahan utama pemerintah Kabupaten Bone adalah bagaimana Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Khususnya menyangkut penyediaan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) teknologi Informasi yang menjadi kendala Utama. Selain itu , perlunya menetapkan kembali regulasi yang berknnan dengan teknologi Informasi guna mendukung pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor. Selanjutnya , bagaimana mendorong Inovasi-Inovasi baru di bidang TIK yang ramah lingkungan dan daya saing tinggi melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kabupaten Bone dalam memberikan Pelayanan Informasi Kepada Publik yang lebih baik. Dengan demikian , diharapkan akan dapat menjadi stimulasi dan kekuatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone dalam peningkatan TIK menuju Bone yang lebih baik.

3.2 Telahan Visi, Misi , dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih

a. Visi

Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah “Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera” Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi Pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

b. Misi

Misi “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).” Dan Misi Ke 5 “Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan publik.” Dari Ke Dua Misi tersebut di mana Dinas Komunikasi Informatika dan

Persandian Kabupaten Bone membantu dalam Pengawasan Pemerintahan yang baik lewat Program Program dan kegiatan yang Transparan Keterbukaan Informasi Public dan Lewat Aspirasi dan Aduan Masyarakat dalam Mengawasi Pemerintahan di kabupaten Bone .

3.3 Telahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

a. Telahan Renstra K/L

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015- 2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.Politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development).Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi pembangunan nasional tahun 2005-2025.Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut.Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Hal itu sejajar dengan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone .

b. Renstra Provinsi

Dalam Rangka Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone Periode 2018-2023 yang lebih baik, akuntabel dan komprehensif diperlukan upaya menganalisis dan menyesuaikan dengan Renstra Kementareriaan dan Propinsi. dengan melihat faktor – faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan OPD Salah satu Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan adalah “Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai Penyelenggara Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Handal menuju Tercapainya Simpul Konektivitas di Kawasan Timur Indonesia”. Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan adalah: a) Menyediakan sarana dan prasarana komunikasi sesuai kebutuhan, b) Menciptakan sistem pelayanan komunikasi dan informatika yang selamat, aman, nyaman dan mampu menjangkau seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, c) Memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan dalam berkomunikasi, d) Mensinergikan potensi komunikasi dan informatika dengan

swasta, masyarakat dan pemerintah, e) Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia agar mampu melaksanakan tugas secara professional

3.4 Telahan Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telahan Rencana Tata Ruang wilayah

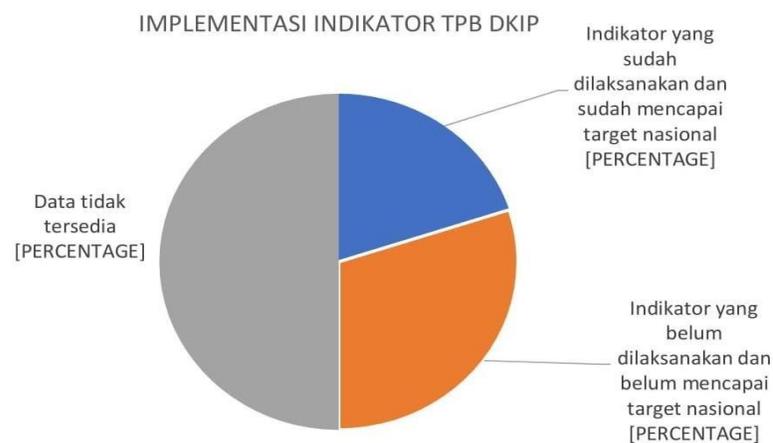
Sistem Prasarana Telekomunikasi dalam Pembangunan dan peningkatan BTS Swasta Semua Kecamatan Swasta dan Peningkatan daya sambung telepon ke fas. sosial, ekonomi, umum, permukiman dan daerah baru Semua Kecamatan APBD Prov./APBD Kab./Swasta dan Masyarakat Telkom, Peningkatan daya sambung telepon ke fas. sosial, ekonomi, umum, permukiman dan daerah

b. Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)

1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone merupakan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bone yang menganani urusan komunikasi, informasi dan persandian. menjadi kewenangannya, yang merupakan indikator dari TPB nomor 5, 9, 16 dan 17. Isu strategis DKIP diantaranya:
2. Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
3. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.
4. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
5. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu

6. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.

Dari total indikator yang telah dilaksanakan oleh DKIP di Kabupaten Bone, jumlah indikator yang telah dilaksanakan dan sudah mencapai target Nasional adalah 2 Indikator, sementara jumlah indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target Nasional adalah sebanyak 3 indikator dan jumlah indikator yang datanya belum tersedia adalah sebanyak 5 indikator. Rincian Lengkap mengenai Keterkaitan Indikator yang sudah dilaksanakan oleh DKIP ditunjukkan pada diagram dan table berikut ini :



Gambar 5.8 Implementasi Indikator TPB DKIP

Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa persentase indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebesar 20, persentase indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional adalah 30%, sementara persentase indikator yang datanya tidak tersedia adalah sebesar 50%. Indikator-indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target harus diperhatikan untuk kemudian dipertimbangkan upaya tambahan dan yang perlu dilakukan untuk mencapai target tersebut serta menjadi bahan pertimbangan untuk arah kebijakan kedepannya. Selain itu, indikator yang tidak diketahui ketercapaiannya menjadi catatan bagi DKIP untuk melengkapi kekurangan data untuk penggambaran kondisi ketercapaian TPB yang lebih baik di masa depan

Tabel 3.1
Keterkaitan Program dan Kegiatan DKIP dengan TPB

		No.	Target	Program/	(PERPRES	Alokasi					
1	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Meningkatkan Penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat					

2	<p>Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi</p>	<p>Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang tahun 2020. berkembang pada</p>	9.c.1*	<p>Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.</p>	<p>(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)</p>	Meningkat	100	100		
---	--	--	--------	---	--	-----------	-----	-----	--	--

4	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan,	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres	Meningkat					
5	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akse	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan	Meningkat					

	<p>Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaanyan g Efektif, Akuntabel, danInklusifdi SemuaTingkatan</p>	<p>Dan kesepakatan internasional.</p>		<p>(PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>	<p>si (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.</p>						
--	--	---------------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

	Pembangunan Berkelanjutan	kapasitas teknologi dan inovasi untuk negarakerang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.								
9	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan	Tersedia ya jangkauan layanan akses telekomunikasi	100 %				

		negarakurang berkembangpada tahun2017dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasidan komunikasi.		internet.	universal dan internet mencapa i 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan .						
--	--	--	--	-----------	---	--	--	--	--	--	--

		Padatahun2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negaraberkemban g, termasuknegara kurang									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Hasil analisis data SDGs kabupaten Bonetahun2017

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Untuk mewujudkan Visi Misi yang diinginkan, Perlu ditetapkan tujuan yang mengarah pada titik sasaran yang akan di capai dengan tetap mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Bupati Terpilih serta dengan memperhatikan isu-isu Strategis :

Tabel 3.2
Permasalahan dan Isu Strategis

No. Indikator	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Tidak ada data	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan khususnya teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Tidak ada data	Secara signifikan meningkatkan terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusa-kan penyediaan akses universal terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Tidak ada data	.
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Tidak ada data	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan perjanjian internasional dan kesepakatan internasional.

No.	Indikator Strategis	Permasalahan	Isu
			<p>mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitas teknologi</p>
17.8.1*	Proporsi individu yang	Tidak ada	<p>Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.</p>
17.8.1.(a)	<p>Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.</p>	Tidak ada data	
17.18.1.(a)	<p>Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.</p>	Tidak ada data	<p>Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data atau berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan</p>

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tujuan dan sasaran terdapat pada misi ke 1 (Pertama

) yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Misi Ke - (Lima) Yaitu ; Mendorong Penciptaan Iklim Investasi yang kondusif untuk Pengembangan Usaha dan Mengembangkan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik . Untuk mewujudkan Visi Misi yang diinginkan, Perlu ditetapkan tujuan yang mengarah pada titik sasaran yang akan di capai dengan tetap mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Bupati Terpilih serta dengan memperhatikan isu-isu Strategis .

Adapun tujuan yang akan di Capai sebagai Berikut :

1. Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebaranluasan Informasi Daerah
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika dan

Persandian Atas dasar tujuan yang diinginkan tersebut, maka ditetapkan 5 (Lima) titik sasaran yang akan dituju sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akses Layanan Informasi dan Aspirasi Publik
2. Meningkatnya Kualitas Layanan E-Government
3. Meningkatnya Pemnfaatan Data Statistik Daerah
4. Meningkatnya Keamanan Data Komunikasi Daerah
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan Sasaran . Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang aka dicapai oleh Dinas Komunikas Informatik dan Persandian adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi Daerah.	Meningkatnya Akses Layanan Informasi dan aspirasi Publik	Persentase Media/saluran Informasi Publik yang efektif (%)	100	100	100	100	100
			Persentase Pemenuhan Data dan informasi Publik (%)	100	100	100	100	100
			Jumlah Konten Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat yang di Publikasikan (%)	100	100	100	100	100
			Persentase Aspirasi/Aduan yang di Tindak lanjuti (%).	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Layanan E-Government	Persentase layanan Publik yg dapat diakses secara Online (%).	58	75	91	100	100
			Persentase E-Government yang Terintegrasi (%).	46	61	77	92	100
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah	Persentase Dokumen Statistik Daerah di Rilis tepat Waktu (%).	80	90	100	100	100
		Meningkatnya Keamanan Data Komunikasi Daerah	Persentase Perangkat daerah yang Memanfaatkan Sandi Pengamanan Data Komunikasi (%).	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	CC	CC	B	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun *strategi* yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Sesuai dengan Tugas dan fungsinya
2. Meningkatkan keterbukaan dan Akses Masyarakat terhadap Informasi dan Aspirasi Publik
3. Mengembangkan dan memanfaatkan system Informasi dalam

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi sebagai berikut :

1. Penguatan Integrasi berbagai jenis pelayanan Publik dan peningkatan akses Informasi Publik yang akurat dan Up to date
2. Peningkatan Transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi dan Aspirasi Public dan keterbukaan Informasi Publik
3. Peningkatan Penyediaan Keamanan Data Informasi Publik dan Data Statistik Sektoral

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada table 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan Sasaran Strategis dan Kebijakan

Visi	<i>Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera</i>		
Misi I	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN I			
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatikadan Persandian.	Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Sesuai dengan Ukuran dan fungsinya	Penguatan Integrasi berbagai jenis pelayanan Publik dan peningkatan akses Informasi Publik yang akurat dan Up to date
Misi V	Menciptakan Iklim Inventaris yang kondusif untuk Mengembangkan Inovasi Daerah untuk Peningkatan Pelayanan Publik		
Tujuan II			

1. Meningkatnya Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan data Komunikasi dan Penyebaran Luasan Informasi Daerah	1. Meningkatnya Akses Layananan Informasi dan Aspirasi Publik	Meningkatkan keterbukaan dan Akses Masyarakat terhadap Informasi dan Aspirasi Publik	Peningkatan Transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi dan Aspirasi Public dan keterbukaan Informasi Publik
	2. Meningkatnya Kualitas Layanan E-Government	Mengembangkan dan memanfaatkan system Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan (e-Government)	Mengembangkan dan memanfaatkan system informasi dalam penyelenggaraan peerintahan (e-Government) dalam implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis TIK yang terintegrasi
	1. Meningkatnya Keamanan Data Komunikasi Daerah.	Meningkatkan Data dan sistem serta sarana	Peningkatan Penyediaan Keamanan Data Informasi Publik dan Data Statistik Sektoral
	1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah	Prasarana Pelayanan Public berbasis Teknologi Informasi	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Program Prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPJMD yang harus tercapai pada tahun 2021. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti pada tabel 6.1 yang bersumber dari dari Tabel Tabel 6.1 Berikut ini :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BONE 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi daerah.	Meningkatnya Akses layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Media/Saluran Informasi Publik yang Efektif						100	100	135,000,000.00	100	148,500,000.00	100	163,350,000.00	100	179,685,000.00	100	197,653,500.00	100		Dinas Kominfo	T.Barat
			1 25 21	Program Pengolahan Komunikasi dan Informasi Publik.	Cakupan Pengembangan Komunikasi dan Media Massa (%).	100	100	135,000,000.00	100	148,500,000.00	100	163,350,000.00	100	179,685,000.00	100	197,653,500.00	100			Dinas Kominfo	T.Barat	
			1 25 21	2 Pengolahan Radio Pemerintah	Jumlah program Siaran yg dikelola (Program)	4	4	20,000,000.00	4	22,000,000.00	4	24,200,000.00	4	26,620,000.00	4	29,282,000.00	4			Dinas Kominfo	T.Barat	
			1 25 21	3 Pengolahan sarana Komunikasi Publik dan pelayanan Saound sistem Pemerintah.	Jumlah Kegiatan yang mendapatkan Layanan Saound Sisten pemerintah (Kegiatan).	12	14	45,000,000.00	14	49,500,000.00	14	54,450,000.00	14	59,895,000.00	14	65,884,500.00	14			Dinas Kominfo	T.Barat	
			1 25 21	1 Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Aduan/Aspirasi yg tertangani (aduan).	6	8	50,000,000.00	10	55,000,000.00	12	60,500,000.00	14	66,550,000.00	16	73,205,000.00	52			Dinas Kominfo	T.Barat	
			1 25 21	4 Monitoring dan Pendataan Media, Radio, TV Kabel, Radio Media Online	Jumlah Kecamatan yang menjadi lokasi pendataan, Media Radio, TV, Kabel Raio Media Online (Kecamatan).	3	4	200,000.00	5	22,000,000.00	5	24,200,000.00	5	26,620,000.00	5	29,282,000.00	5			Dinas Kominfo	T.Barat	
			1 25 17	Program Fasilitas Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi.	Persentase Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang melaksanakan tugas sesuai dengan Regulasi	100	100	35,000,000.00	100	38,500,000.00	100	42,350,000.00	100	46,585,000.00	100	51,243,500.00	100			Dinas Kominfo	T.Barat	
			1 25 17	1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi.	Jumlah Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yg dilatih (PPID).	66	100	35,000,000.00	66	38,500,000.00	66	42,350,000.00	66	46,585,000.00	66	51,243,500.00	66			Dinas Kominfo	T.Barat	
		Persentase Pemenuhan data dan Informasi Publik						100		100		100		100		100				Dinas Kominfo	T.Barat	
		Jumlah Konten Informasi di Bidang Pemerintahan pembangunan dan Kemasayarakatan yg di Publikasikan						100		100		100		100		100				Dinas Kominfo	T.Barat	

		Persentase Aspirasi/aduan yang di Tindak lanjuti (%).								100		100		100		100			Dinas Kominfo	T.Barat						
	Meningkatnya Kualitas layanan E-Government	Persentase Layanan Publik yang dapat di Akses Secara online								75		91		91		100			Dinas Kominfo	T.Barat						
		Persentase E-Government yang Terintegrasi								58		0.61		775		92			Dinas Kominfo	T.Barat						
			1	25	15				Program Pengembangan Komunikasi Informasi di Media Massa	Cakupan Pengembangan Komunikasi dan Media Massa (%).	8	100		1,658,000,000.00	100	3,312,700,000.00	100	3,643,970,000.00	100	4,008,367,000.00		4,409,203,700.00	100	Dinas Kominfo	T.Barat	
			1	25	15	3			Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan informasi.	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yg dibentuk. (KIM).	8	11		95,000,000.00	16	104,500,000.00	21	114,950,000.00	27	126,445,000.00	33	139,089,500.00	108	Dinas Kominfo	T.Barat	
			1	25	15	2			Pembina dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Layanan Pemeliharaan sarana jaringan Komunikasi dan informasi (layanan).	2	2		29,000,000.00	2	31,900,000.00	2	35,090,000.00	2	38,599,000.00	2	42,458,900.00	2	Dinas Kominfo	T.Barat	
			1	25	15	6			Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi.	Jumlah Rata-Rata Kecepatan Bandwidth ke OPD Apload/Donload (Mbps).		10		1,534,000,000.00	12	3,176,300,000.00	15	3,493,930,000.00	20	3,843,323,000.00	20	4,227,655,300.00	77	Dinas Kominfo	T.Barat	
			1	25	18				Program Kerjasama dengan Mas Media.	Cakupan Pengembangan Komunikasi dan Media Massa (%).	100	100		121,000,000.00	100	133,100,000.00	100	146,410,000.00	100	161,051,000.00	100	177,156,100.00	100	Dinas Kominfo	T.Barat	
			1	25	18	1			Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.	Jumlah Kegiatan Pembangunan yg di Publikasikan Melalui baliho, spanduk, benner (Kegiatan).	250	250		75,000,000.00	68	90,825,000.00	68	99,907,500.00	68	109,098,250.00	68	120,088,075.00	340	Dinas Kominfo	T.Barat	
			1	25	18	2			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Jumlah Media layanan Penyedia Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.		2		11,000,000.00	2	12,100,000.00	2	13,310,000.00	2	14,641,000.00	2	16,105,100.00	2	Dinas Kominfo	T.Barat	
			1	25	18	4			Pengenalan Internet kepada Masyarakat.	Jumlah Peserta yg mengikuti Sosialisasi Aplikasi Berbasis online (orang).	50	54		35,000,000.00	60	38,500,000.00	66	42,350,000.00	72	46,585,000.00	79	51,243,500.00	331'	Dinas Kominfo	T.Barat	
			1	29	19				Program Pengembangan dan Implementasi E-Government.	Persentase Pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (%).	100	100		66,000,000.00	100	72,600,000.00	100	79,860,000.00	100	87,846,000.00	100	96,630,600.00	100	Dinas Kominfo	T.Barat	
			1	25	19	1			Bimtek Pengelolaan Domain, Website, Blog Bagi Aparat Pemerintah daerah.	Jumlah Aparat Pengelola Domain, Website, Blog yg mengikuti Bimtek (orang).	0	50		30,000,000.00	30	33,000,000.00	54	36,300,000.00	39	39,930,000.00	39	43,923,000.00	212	Dinas Kominfo	T.Barat	
			1	25	19	4			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan E-Government.	Jumlah Sistem Aplikasi E-Government yg diimplementasikan dan diMonitoring. (Aplikasi).		8		36,000,000.00	10	39,600,000.00	15	43,560,000.00	20	47,916,000.00	25	52,707,600.00	25	Dinas Kominfo	T.Barat	
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah.	Persentase Dokumen statistik Daerah di Rilis Tepat waktu,												80		90		100		100		100			Dinas Kominfo	T.Barat

			1	23	15		Program pengembangan Data Informasi statistik Daerah.	Persentase Dokumen Statistik Daerah Dirilis Tepat waktu (%).	80	80	230,000,000.00	90	253,000,000.00	100	278,300,000.00	100	241,120,000.00	100	336,743,000.00	100	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	23	15	1	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah.	Jumlah Buku SIPD yang telah di Publikasi (Buku).	1	1	83,000,000.00	1	91,300,000.00	1	100,430,000.00	1	110,473,000.00	1	121,520,300.00	1	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	23	15	1	Pengolahan Updating dan Analisis Data Statistik Daerah.	Jumlah Buku DDA yang telah di Publikasi ((Buku).	1	1	54,600,000.00	1	60,060,000.00	1	66,066,000.00	1	7,662,600.00	1	79,939,860.00	1	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	23	15	4	Verifikasi dan Validasi Sistem Data Base Desa.	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi SDDK (Desa/Kel.)	372	372	92,400,000.00	372	101,640,000.00	372	111,804,000.00	372	122,984,400.00	372	135,282,840.00	372	Dinas Kominfo	T.Barat
	Meningkatnya Keamanan Data Komunikasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sandi Pengamanan Data Komunikasi (%)									100		100		100		100		100		Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	20		Program Peningkatan Keamanan Informasi dan persandian.	Persentase Pengelolaan Dokumen Berita/Informasi Layanan persandian (%).	100	100	110,000,000.00	100	121,000,000.00	100	133,100,000.00	100	145,604,800.00	100	160,164,400.00	100	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	20	1	Pengelolaan Sumber Daya Persandian	Jumlah Akses Penggunaan Layanan Peralatan persandian (Layanan).	0	1000	36,600,000.00	1000	40,260,000.00	1000	44,286,000.00	1000	48,312,000.00	1000	53,143,200.00	5000	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	20	2	Pengelolaan Jaringan Komunikasi persandian	Jumlah Berita yang terkirim melalui JKS (Berita).		1000	36,600,000.00	1000	40,260,000.00	1000	44,286,000.00	1000	48,312,000.00	1000	53,143,200.00	5000	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	20	3	Pengelolaan dan pengamanan Data Berita Informasi.	Jumlah Berita yang di terima dan distribusikan tepat waktu (Berita).		1000	36,800,000.00	1000	40,480,000.00	1000	44,528,000.00	1000	48,980,800.00	1000	51,878,880.00	5000	Dinas Kominfo	T.Barat
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP.									100		100		100		100		100		Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan pelayanan Administrasi Perkantoran (%).		100	795,859,800.00	100	911,889,780.00	100	1,003,078,758.00	100	1,103,385,943.00	100	1,213,725,196.00	100	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	1	2	Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi Telpn,Air dan listrik (Rekening).	36	36	85,600,000.00	36	94,160,000.00	36	103,576,000.00	36	113,933,000.00	36	125,326,960.00	180	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	1	7	Penyediaan Jasa Admnistrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Pendukung yg mendapatkan Jasa Administrasi keuangan dan Asuransi (Orang).	35	35	195,144,000.00	36	251,102,400.00	36	276,212,640.00	36	303,833,904.00	36	334,217,294.00	36	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kebersihan Kantor yang disediakan (Jenis).	100	100	4,999,000.00	100	5,498,900.00	100	6,048,790.00	100	6,653,579.00	100	7,318,936.00	100	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/peneranganm Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan (Jenis)	1	1	15,000,000.00	1	16,500,000.00	1	18,150,000.00	1	19,965,000.00	1	21,961,500.00	1	Dinas Kominfo	T.Barat

			1	25	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Media yang menyediakan bahan Bacaan dan peraturan perundang-Undangan (Media)	10	10	5,000,000.00	10	5,500,000.00	10	6,050,000.00	10	6,655,000.00	10	7,320,500.00	10	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	1	23	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah.	Jumlah Rapat Koordinasi dan Koonsultasi yang diikuti (Kegiatan).	110	110	272,000,000.00	110	299,200,000.00	110	329,120,000.00	110	362,032,000.00	110	398,235,200.00	550	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	1	24	Pelaksanaan Admnistrasi Perkantoran.	Jumlah penjang Pelaksanaan Administrasi perkantoran (Paket)	7	7	218,116,800.00	7	239,928,480.00	7	263,921,328.00	7	290,313,460.00	7	319,344,806.00	35	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Cakupan Realisasi Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100	277,101,000.00	100	793,381,100.00	100	850,719,210.00	100	959,991,131.00	100	1,177,655,744.00	100	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	2		Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (unit).	0	0	0	2	56,000,000.00	2	61,600,000.00	2	67,760,000.00	2	74,536,000.00	8	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	2	7	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (paket)	2	2	31,000,000.00	2	188,370,000.00	2	207,207,000.00	2	227,927,700.00	2	250,720,470.00	10	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	2		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket).	4	4	45,000,000.00	5	235,000,000.00	5	258,500,000.00	5	284,350,000.00	5	262,751,500.00	25	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	2	9	Pengadaan Mobileur.	Jumlah Pengadaan Meubeleur (Unit).		0	0	5	106,000,000.00	5	116,600,000.00	5	128,260,000.00	5	312,785,000.00	20	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	2	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor.	Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara (Unit).	1	1	104,101,000.00	1	114,511,100.00	1	125,962,210.00	1	138,558,431.00	1	152,414,274.00	1	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional.	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang di Peihara (unit).	3	3	40,000,000.00	5	44,000,000.00	5	48,400,000.00	5	53,240,000.00	5	58,564,000.00	5	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	2	28	Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di Pelihara (unit).	25	25	45,000,000.00	25	49,500,000.00	25	54,450,000.00	25	59,895,000.00	25	65,884,500.00	25	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur (%)			0	100	20,650,000.00	100	22,715,000.00	100	24,986,500.00	100	27,485,150.00	100	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Bagi ASN (Pasang).	0	0	0	59	20,650,000.00	59	22,715,000.00	59	24,986,500.00	59	27,485,150.00	59	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	5		Program Peningkatan kapasitas sumber Daya Aparatur.	Persentase Peningkatan Kpasitas Sumber Daya Aparatur (%)		100	20,000,000.00	100	22,000,000.00	100	24,200,000.00	100	26,620,000.00	100	29,282,000.00	100	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	5	3	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Aparat yg Mengikuti Bimtek (Orang).	60	60	20,000,000.00	60	22,000,000.00	60	24,200,000.00	60	26,620,000.00	60	29,282,000.00	60	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian Kinerja Keuangan.	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	100	60,000,000.00	100	66,649,000.00	100	73,313,900.00	100	80,645,290.00	100	88,709,819.00	100	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	6	1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah Dokumen Realisasi Capaian Kinerja yang tersusun (Dokumen).	3	3	30,000,000.00	3	33,649,000.00	3	37,013,900.00	3	40,715,290.00	3	44,786,819.00	15	Dinas Kominfo	T.Barat

			1	25	6	2	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran.	Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun (laporan).	3	3	30,000,000.00	4	33,000,000.00	4	36,300,000.00	4	39,930,000.00	4	43,923,000.00	16	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	8		Program Penunjang Pemerintahan Umum.	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%).		100	37,039,200.00	100	49,999,800.00	100	54,999,780.00	100	60,499,758.00	100	67,154,731.00	100	Dinas Kominfo	T.Barat
			1	25	8	1	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat daerah yang tersusun (Dokumen).	5	5	37,039,200.00	5	49,999,800.00	5	54,999,780.00	5	60,499,758.00	5	67,154,731.00	25	Dinas Kominfo	T.Barat
JUMLAH											3,545,000,000.00		5,943,969,680.00		6,516,366,648.00		7,126,387,422.00		8,032,807,440.00			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023. Dapat dilihat dari table 7.1.

Tabel 7.1

**INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH MENURUT
PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2018-2023**

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Bassel e 2017	Kondisi Aw al 20 18	Target Kinerja				Kondisi Akhir 2023	Penanggu ng Jawab
					201 9	2020	2021	2022		
	Komunikasi Informatika dan Statistik									
1	Persentase Media/Saluran Informasi Publik yang Efektif (%)	Persen			100	100	100	100	100	Dinas Kominfo
2	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi Publik (%).	Persen			100	100	100	100	100	
3	Jumlah Konten Informasi di Bidang Pemerintahan,Pembangunan dan kemasyarakatan yang di Publikasikan	Persen			100	100	100	100	100	
4	Persentase Aspirasi/aduan yang di Tindak Lanjuti (%)	Persen			100	100	100	100	100	
5	Persentase Layanan Publik yang dapat diAkses secara Online	Persen			75	91	100	100	100	
6	Persentase E-Government yang Terintegrasi	Persen			61	77	92	100	100	
7	Persentase Dokumen Statistik Daerah di Rilis tepat Waktu	Persen			90	100	100	100	100	
8	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sandi Pengamanan data Komunikasi	Persen			100	100	100	100	100	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023 Mengacu Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Bone yang merupakan Penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati terpilih Periode 2018-2023,serta dengan mempertimbangkan kondisi nomatif yang tercermin dalam Visi,Misi tersebut juga pertimbangan terhadap perkembangan kondisi objektif pada saat ini dan di masa mendatang dalam kontreks lima tahunan, oleh karena itu pemahaman akan Visi,Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2018-2023 dala proses perumusan Rencana Strategi Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 menjadi amat penting.

Didalam Rencana Strategi Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kabupaten Bone ini memuat Latar Belakang, Gambaran pelayanan , Permasalahan dan Isu –Isu Strategis Perangkat daerah , Tujuan dan Sasaran , startegi dan Arah kebijakan , Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang terinci dari Dinas Komunikasi,Informatika dan Persandian untuk periode 5 (lima) Tahun.

Perhatian Terhadap berbagai hal yang menjadi kekuatan, kelemahan,peluang dan tantangan dalam bidang komunikasi dan Informatika menjadi sesuatu yang penting untuk dimaknai guna pencapaian keberhasilan segala yang tertuang dalam Rencana Strategi Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Demikian Rencana Strategis ini dibuat dengan kekurangan dalam hal penulisan dan Penyampaian dengan mengharapkan sumbang saran dari pembaca yang bersifat membangun Dinas Komunikasi informatika dan Persandian Laporan Tahunann Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan persandian Bone diharapkan perencanaan pembangunan bidang Komunikasi Informatika, dan Persandian Kabupaten Bone dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua Pihak .